

## ISLAM PROGRESIF INDONESIA: TELAAH PEMIKIRAN DAN GERAKAN JARINGAN ISLAM LIBERAL (JIL)

A. ILYAS ISMAIL

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Email: [ilyasismail@hotmail.com](mailto:ilyasismail@hotmail.com)

### Abstract

*Theologically, Islam is one and absolutely correct. However, historically, after being understood and translated into the real life, Islam is not single, but various or plural that manifests at least in three schools of thoughts: Traditional Islam, Revivalist Islam (fundamentalism), and Liberal Islam (Progressive). The group of Jaringan Islam Liberal (JIL) represents the fast school of thoughts. Even though it is still young (ten years), JIL becomes popular because it frequently proposes the new thoughts that often evoke controversies in the community. The reformation of thoughts proposed by JIL covers four areas: first, reformation in politics. In this context, JIL gives a priority to the idea of secularism; Second, reformation in socio-religion. Dealing with this, JIL proposes the concept of pluralism; Third, reformation in individual freedom. In this case, JIL gives a priority to the idea of liberalism both in thoughts and actions; fourth, reformation in women. Regarding this, JIL proposes the idea of gender equality. This reformation thought of JIL receives pro and con in the community. On the one hand, some of them praise and fulminate it; on the other hand, the other ones support and give appreciation. In such situation, JIL grows as a thought and Islamic progressive movement in Indonesia. In addition, JIL grows as a thought and Islamic progressive movement in Indonesia.*

**Key Words:** *Islamic Thought, JIL, Secularism, Pluralism, Liberalism, and Gender Equality.*

### Abstrak

*Secara teologis, Islam adalah satu (tunggal) dan mutlak benar. Namun, secara historis, setelah dipahami dan diterjemahkan dalam realitas kehidupan, Islam tidaklah tunggal melainkan beragam yang mewujudkan dan*

*mengejawantah setidaknya-tidaknya dalam tiga aliran pemikiran, yaitu Islam tradisional, Islam revivalis (fundamentalisme), dan Islam liberal (progresif). Kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL) mewakili pola pemikiran yang terakhir. Meski usianya relatif muda, baru 10 tahun, JIL menjadi populer karena mengusung pemikiran-pemikiran baru yang sering memunculkan kontroversi dalam masyarakat. Pembaharuan pemikiran yang diusung JIL menyangkut empat bidang, yaitu pertama, pembaruan dalam bidang politik (gagasan sekularisme); kedua, pembaruan dalam bidang sosial agama (ide atau konsep pluralisme); ketiga, pembaruan dalam kebebasan individu (gagasan liberalisme baik dalam berpikir maupun bertindak); dan keempat, pembaruan dalam bidang perempuan (ide kesetaraan gender). Pemikiran pembaharuan JIL ini mendapat respon pro dan kontra dalam masyarakat. Sebagian mencela dan mengecamnya, tetapi sebagian lagi memberi apresiasi dan mendukungnya. Dalam suasana semacam itulah JIL terus tumbuh sebagai pemikiran dan gerakan Islam progresif di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Pemikiran Islam, JIL, sekularisme, pluralisme, liberalism, dan kesetaraan gender.*

## **Pengantar**

Islam biasa dibedakan dalam arti teologis dan historis. Secara teologis, seperti sering dikemukakan Harun Nasution, Islam adalah tunggal dan bersifat mutlak benar. Namun secara historis, setelah dipahami dan diamalkan dalam dimensi ruang dan waktu, Islam tidak tunggal, tetapi beragam, yang mengejawantah dalam berbagai aliran pemikiran (school of thoughts) mulai dari yang paling tradisional (ortodoks) hingga yang paling liberal.

Dalam kaitan ini, John L. Esposito membaca pola pemikiran Islam ke dalam empat kategori, yaitu pola pemikiran sekular, konservatif, neo tradisional (neo fundamentalis) dan reformis (neomodernis).<sup>1</sup> Sementara, Charles Khurzman mengklasifikasi aliran pemikiran Islam ke dalam tiga kelompok, yaitu Islam tradisional (*Traditional Islam*), Islam fundamentalis atau radikal (*Fundamentalis Islam*), dan Islam liberal (*Liberal Islam*). Ketiganya, menurut Khurzman, saling berlawanan satu sama lain.

Di Indonesia, kelompok Islam liberal bergabung dalam kelompok yang menamakan diri, Jaringan Islam Liberal (JIL). Kelompok ini lahir sebagai respon atas munculnya Islam orotodok atau konservatif, dan juga Islam radikal, yang mulai mendominasi ruang publik di Indonesia sejak penghujung abad yang lalu. Dengan sokongan dari 28 kontributor domestik dan Internasional, tokoh-tokoh muda seperti Luthfi Assaukanie (Paramadina), Ulil Abshar Abdalla (Lakpesdam NU) dan Ahmad Sahal (jurnal Kalam) disebut-sebut sebagai pelopor dan pengelola periode awal JIL<sup>2</sup>.

Memasuki usianya yang kesepuluh, JIL dengan program-programnya, telah banyak mewarnai pemahaman dan penafsiran Islam Indonesia kontemporer. Tentu saja perjuangan itu bukannya tanpa hambatan dan perlawanan. Seperti telah dijelaskan di muka, JIL sebagai corong penafsiran Islam bercorak progresif berhadapan dengan sejumlah organisasi, ormas baik dari kelompok muslim radikal-fundamental maupun tokoh-tokoh ulama konservatif-ortodoks. Singkat kata, kemunculan JIL dalam kancah pemikiran Islam di Indonesia telah menjadi semacam kontroversi publik. Seperti halnya perlawanan dari kelompok fundamental dan konservatif tersebut, dukungan moral dan material terhadap gerakan ini juga berdatangan dari banyak pihak, baik dalam maupun luar negeri. Dalam perkembangan berikutnya, eksistensi JIL di Indonesia menjadi suatu fenomena yang menarik untuk diteliti oleh banyak kalangan, baik dari dalam maupun internasional.

Tidak kurang sejumlah artikel dan disertasi ditulis sebagai bentuk analisa atas gerakan Islam progresif ini. Sebut saja artikel bertema "*The Rise of Liberal Islam: Network in Indonesia*" yang ditulis oleh Muhammad Ali, seorang dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menjalani studi doktoralnya di Universitas Hawaii Amerika Serikat. Artikel setebal 26 halaman ini membahas tentang fenomena kebangkitan Islam liberal di Indonesia dengan spesifikasi bahasan JIL. Ada lagi tulisan bertajuk "*Developing Islamic Argument for Change Through Liberal Islam*" yang disusun oleh Virginia M. Hooker, Guru Besar Studi Asia di Australian National University (ANU). Tulisan setebal tidak kurang dari 29 halaman ini merupakan kumpulan tulisan dari jurnal studi Asia Tenggara yang digarapnya bersama Amin Saikal. Dari disertasi, ada tulisan dari Nicolaus Teguh Budi

Harjanto bertajuk "*Islam and Liberalism in Contemporary Indonesia*" yang ditujukan kepada Faculty of Arts and Sciences di Universitas Ohio.

Tulisan ini mengetengahkan perkembangan 10 tahun pemikiran dan gerakan JIL di Indonesia (Maret 2001-2011), terutama berkenaan dengan sejarah kelahiran, gagasan-gagasan, gerakan dan sosialisasi ide, respon, serta analisis mengenai masa depan JIL di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia yang makin terbuka dan demokratis.

### **Sejarah Kelahiran Jaringan Islam Liberal di Indonesia.**

Seperti sedikit telah disinggung di atas, ada keterkaitan antara era reformasi di Indonesia (1997-98) dengan kebangkitan pemikiran dan gerakan Islam liberal. Sebelum reformasi, pemerintahan rezim Soeharto berusaha menekan sebisa mungkin aspirasi-aspirasi kelompok Islamis dan mencegahnya tampil terbuka di ruang publik. Ketika pemerintahan Soeharto berakhir, ruang politik mulai terbuka dan lebih demokratis. Bersama dengan itu, orang-orang radikal-fundamentalis dan kelompok Islamis yang dulu pernah dibungkam di masa Soeharto, kini mulai memberanikan diri muncul ke permukaan<sup>3</sup>.

Fakta menunjukkan bahwa di era pemerintahan baru Indonesia, kelompok radikal-fundamentalis itu lebih vokal mengampanyekan ide-idenya. Bagi kebanyakan kelompok muslim moderat, fenomena ini menjadi suatu yang mengkhawatirkan bagi kelangsungan Indonesia di masa depan. Kekhawatiran itu terutama dibuktikan bersamaan dengan munculnya konflik antar etnis-agama di beberapa wilayah lokal seperti Kalimantan dan Sulawesi<sup>4</sup>. Kelahiran kelompok-kelompok seperti MMI, FPI, PK, HTI serta kelompok-kelompok fundamentalis lainnya yang ditengarai menjadi sebab munculnya konflik antar agama dipandang makin mengancam kesatuan NKRI<sup>5</sup>.

Kelompok muslim moderat memandang situasi seperti tersebut di atas makin tidak bisa dibiarkan. Sebab jika tidak, maka lama kelamaan situasi tersebut akan menggerogoti wibawa negara dan merusak demokratisasi dan toleransi di Indonesia<sup>6</sup>. Mereka melihat, bahwa semakin hari kelompok muslim radikal-fundamental

makin militan, sistematis, dan terorganisir. Sementara itu, pemikiran dan kelompok muslim moderat-progresif lemah, tidak terorganisir, tidak punya perlawanan, apalagi kekuatan untuk menyampaikan ide-ide pembaruannya<sup>7</sup>. Untuk itulah, pada awal tahun 2001 enam pemuda muslim progresif, yakni Ulil Abshar Abdalla, Luthfi Assaukanie, Hamid Basyaib, Ihsan Ali Fauzi, Nong Darol Mahmada dan Ahmad Sahal, berkumpul dan membicarakan pentingnya membangun suatu jaringan gerakan pemikiran progresif di Indonesia. Kemudian pada tanggal 8 Maret 2001, berdirilah sebuah jaringan yang memayungi pemikiran-pemikiran liberal di Indonesia yang kemudian dikenal orang dengan Jaringan Islam Liberal (JIL)<sup>8</sup>.

Pendirian JIL yang diprakarsai dan difasilitasi oleh budayawan Goenawan Muhammad itu ditandai dengan diadakannya diskusi perdana di Teater Utan Kayu Jakarta dan peluncuran *mailing list* JIL dan selanjutnya website [www.Islamlib.com](http://www.Islamlib.com). Ketika didirikan, JIL tidak diniatkan sebagai sebuah organisasi formal seperti halnya Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama (NU). Menurut para pendirinya, JIL hanyalah organisasi jaringan saja, yang bersifat cair dan lepas. Pendirian tersebut kemudian diikuti oleh perlawanan depensif dari kelompok-kelompok fundamentalis yang merasa tertandingi dan terancam eksistensinya di Indonesia<sup>9</sup>.

### **Gagasan Pembaruan Kelompok Islam Progresif.**

Sebagai bentuk respon terhadap situasi modern, pemikiran progresif Islam sejatinya adalah suatu bentuk usulan pembaharuan agama. Agar Islam bisa relevan dengan konteks kehidupan umat manusia mutakhir, ia harus ditafsirkan ulang. Dalam pandangan muslim progresif, penafsiran ulang atas Islam tidak didasarkan atas model masa lalu—seperti pandangan kaum fundamentalis, tetapi didasarkan atas kondisi kekinian dan temuan-temuan terbaru ilmu pengetahuan. Tradisi dan masa lalu, mesti dipahami semangatnya secara kontekstual sesuai kebutuhan zaman saat itu. Dalam pemikiran progresif Islam, semangat substansial dari masa lalu itulah yang ditransfer ke masa kini, dan bukan model formalnya<sup>10</sup>.

Untuk menafsirkan Islam sesuai dengan konteks kekinian itu, kelompok muslim progresif dari JIL mengajukan ide pembaharuan dalam empat ranah kehidupan masyarakat Islam. *Pertama*, pembaharuan dalam aspek kehidupan bernegara melalui konsep sekularisme; *kedua*,

pembaruan dalam aspek kehidupan sosial-kemasyarakatan melalui konsep pluralisme; *ketiga*, pembaruan dalam aspek kehidupan individu melalui konsep liberalisme; dan *keempat*, pembaruan dalam bidang kesetaraan gender. Walaupun bidang garapannya berbeda, keempat agenda pembaharuan Islam progresif itu berkait-kelindan satu sama lain.

Sekularisasi yang dimaksud para pemikir progresif adalah desakralisasi dan demitologisasi. Baik desakralisasi maupun demitologisasi, masing-masing mengarah kepada diferensiasi, pembedaan antara yang sakral dan yang profan, dan bukan memisahkan antara persoalan duniawi dan ukhrawi<sup>11</sup>. Dalam konteks kehidupan bernegara, diferensiasi ini amat penting agar negara tidak mempolitikasi agama pada satu sisi, dan agar agama tidak menjadi beban negara di sisi yang lain. Dalam pandangan muslim progresif, negara yang sehat adalah bentuk negara demokratis. Negara yang berpaham demokrasi dalam pengertian yang sebenarnya, menurut pemikir muslim progresif, tidak bisa kecuali didirikan di atas landasan sekularisme.<sup>12</sup> Luthfi Assaukanie, misalnya, menyebut tiga usulan model negara demokrasi di Indonesia, negara Islam demokrasi, negara religius demokrasi, dan negara sekular demokrasi. Menurut Assaukanie, dua model yang pertama adalah bentuk negara demokrasi yang semu, atau demokrasi setengah hati. Sebaliknya, negara yang mampu menjalankan demokrasi dengan benar adalah negara dalam bentuknya yang sekular.<sup>13</sup>

Dalam negara yang sekular, agama disikapi secara netral. Negara tetap menghormati orang beragama, tapi di sisi lain tidak menganakemaskan bentuk agama tertentu. Agama-agama itu dalam konteks negara sekular adalah sederajat dan memiliki ruangnya tersendiri. Dalam hal ini, negara hanya boleh menjalankan aspirasi yang menampung semua kepentingan warga negara. Adalah sebuah kesalahan beranggapan bahwa negara sekular mengancam eksistensi agama dan umat beragama. Justru menurut para pemikir progresif, model negara sekular adalah upaya untuk melindungi kebebasan beragama dan menyelamatkan agama-agama. Kenyataannya, menurut pemikir muslim progresif, dalam praktik negara-negara maju yang berpaham sekular, agama-agama tetap hidup dan dihormati keberadaannya<sup>14</sup>.

Bagi para pemikir muslim progresif, sekularisme adalah konsekuensi logis dari demokrasi. Demokrasi sendiri, sejatinya kelanjutan dari penerimaan konsep *nation-state* yang menggantikan bentuk lama negara teokrasi. Sejak pembaruan Islam digulirkan, umat muslim kebanyakan sudah bisa menerima demokrasi dan bentuk negara bangsa, tapi mereka masih kesulitan untuk menerima sekularisme. Padahal, demokrasi yang benar sejatinya tidak mungkin dijalankan tanpa sekularisme. Negara yang hanya mau menjalankan demokrasi, tanpa menerima sekularisme, dalam praktiknya nanti justru akan mencederai prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri<sup>15</sup>. Dari sini, para pemikir muslim progresif hendak mengatakan, jikalau negara-negara muslim ingin mengejar ketinggalannya mereka mesti memperbarui pandangan keagamaan mereka dan mulai belajar menerima sekularisme.

Dari segi pembaruan kehidupan sosial, para pemikir progresif JIL mengusulkan ide pluralisme. Jika sekularisme berusaha menempatkan agama-agama secara proporsional dengan menghindari politisasi negara terhadap agama, maka pluralisme berusaha memperbarui pandangan eksklusif dalam doktrin agama-agama. Menurut para pemikir muslim progresif, doktrin tentang superioritas suatu agama yang mengatasi agama-agama lain dalam kontek masyarakat yang plural tidak mungkin lagi dipertahankan. Lebih dari itu, para umat beragama itu dituntut untuk terlibat aktif, bekerjasama dalam penuntasan masalah-masalah kemanusiaan. Keaktifan dan kerjasama tersebut mengharuskan adanya dialog teologis antar keyakinan (*interfaith dialouge*).<sup>16</sup>

Ide pluralisme memang menafikan pandangan tentang satu-satunya agama yang paling benar, tapi juga sebuah kesalahan memandang pluralisme sebagai paham yang menyamakan semua agama. Pluralisme memandang masing-masing agama sebagai yang unik, dan benar menurut kriteria masing-masing (*It's valid within it's categories*)<sup>17</sup>. Dalam pemikiran muslim progresif, paham pluralisme menolak menggunakan standar ganda untuk menilai agama orang lain. Lebih dari itu, paham pluralisme mengajak untuk memandang penganut agama lain sebagai rekan seperjalanan (*fellow traveler*), dan bukan sebagai pihak lian<sup>18</sup>.

Menurut Buddhy Munawar Rachman—salah seorang pemikir muslim progresif Indonesia—pluralisme mencakup tiga pengertian.

*Pertama*, pluralisme menghendaki adanya keterlibatan aktif dalam perbedaan dan keragaman untuk membangun peradaban bersama. Pluralisme, menurut Rachman, menghendaki lebih dari sekedar mengakui pluralitas keragaman dan perbedaan, tetapi mengajak untuk aktif merangkai keragaman dan perbedaan itu untuk tujuan sosial yang lebih tinggi, yaitu kebersamaan dalam membangun peradaban. *Kedua*, pluralisme bukan hanya sekedar toleransi. Menurut Rachman, pluralisme mengandaikan pengenalan secara lebih mendalam atas yang lain itu hingga melahirkan *mutual understanding*. Dalam konteks pembaruan aspek kehidupan sosial, bentuk *mutual understanding* itu amat diperlukan demi melahirkan transformasi keragaman kepada toleransi konstruktif yang bisa menjadi landasan menciptakan sebuah peradaban seperti pernah terjadi dalam sejarah Spanyol Islam (Andalusia). *Ketiga*, pluralisme bukan relativisme. Pengalaman mendalam atas yang lain, begitu Rachman menjelaskan, akan membawa konsekuensi mengakui sepenuhnya nilai-nilai dari kelompok yang lain. Walaupun demikian, toleransi yang aktif tersebut menolak paham relativisme, seperti pernyataan simplistis bahwa "semua agama itu sama saja". Sebaliknya, yang diinginkan dari pluralisme adalah mengelola potensi keragaman itu untuk membangun komitmen bersama mewujudkan toleransi aktif, sebagai dasar konstruksi sebuah peradaban.<sup>19</sup>

Untuk memperbarui pemahaman keagamaan ke arah pluralisme, kaum muslim progresif berusaha mengajukan konsep *common platform* agama-agama. Jadi, walaupun secara formal agama-agama itu berlainan satu sama lain, tetapi secara esensial semuanya memiliki cita-cita dan tujuan yang sama. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia ini, begitu kaum muslim progressif, yang perlu ditonjolkan adalah kesamaan esensial agama-agama itu, dan bukan aspek formalnya<sup>20</sup>. Dalam konteks sipil, teologi pluralisme ini kemudian dielaborasi lebih jauh menjadi multikulturalisme, suatu paham kebernegeraan yang menempatkan agama-agama dalam ranah kultur yang beraneka ragam. Negara memposisikan semua religio-cultur itu dalam kedudukan yang setara dan menampung semua aspirasi secara proporsional dan seimbang. Menurut pandangan kaum muslim progresif, ide multikulturalisme sebagai kelanjutan pluralisme ini diusulkan, untuk melahirkan suatu format negara *welfare state* seperti negara-negara maju pada umumnya<sup>21</sup>.

Kekerasan atas nama agama terhadap jemaat Ahmadiyah dan pengrusakan tempat-tempat ibadah yang terjadi belakangan ini, menurut pemikir muslim progresif, adalah bukti kegagalan agama-agama menerapkan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia<sup>26</sup>. Karena itulah, maka kebutuhan akan liberalisme di Indonesia menjadi suatu yang tidak bisa dihindari. Aplikasi paham liberalisme, oleh negara dilakukan dengan menciptakan kondisi yang kondusif untuk sistem demokrasi. Prinsip tersebut diwujudkan ke dalam suatu undang-undang yang mendukung dan memayungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Undang-undang tersebut, demikian kelompok progresif menjelaskan, diperlukan untuk memproteksi warga dari tindakan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan yang mengatasnamakan agama di satu sisi, sekaligus membatasi otoritas negara supaya tidak mencampuri keyakinan, ibadah, dan aturan-aturan agama pada sisi yang lain<sup>27</sup>.

Selain kebebasan berkeyakinan dan memilih agama, liberalisme juga menghendaki kebebasan individu untuk berfikir dan menafsirkan sendiri agamanya. Menurut para pemikir muslim progresif, Islam tidak memberikan keistimewaan kepada kelompok tertentu untuk menafsirkan agama (*lā rubbāniyyah fī al-Islām*). Lebih dari itu, masing-masing individu dipersilahkan untuk mendalami dan memahami agamanya sesuai dengan taraf kemampuannya. Karena itu, para pemikir muslim progresif menolak setiap bentuk otoritas penafsiran pemuka agama. Liberalisme menghendaki agar dominasi tokoh-tokoh keagamaan dihilangkan dan dipersempit ruangnya untuk mereka tampil secara lebih besar. Demikian itu diupayakan agar tidak ada lagi kekhawatiran individu dari segala bentuk intimidasi yang mengatasnamakan agama seperti pemurtadan, penyesatan atau pengkafiran<sup>28</sup>.

Menurut para pemikir muslim progresif, sejarah kemajuan Islam adalah sejarah kebangkitan liberalisme. Pada masa keemasan Islam, kebebasan berfikir dihargai dan tidak pernah dicurigai. Karena itu, menurut catatan Muhammad Iqbal—sarjana kenamaan India—saat itu tidak heran jika sejarah menyebut tidak kurang dari seratus sistem teologi muncul dalam Islam<sup>29</sup>. Liberalisme dalam sejarah pemikiran Islam telah menghasilkan kreativitas dan kemajuan-kemajuan yang signifikan di masanya. Situasi demikian itu, terutama didukung oleh sikap para khalifah yang menghargai kebebasan berfikir dan berpendapat. Kemunduran Islam justru terjadi, ketika dominasi otoritas mulai menggantikan kebebasan berfikir dan kejumudan menggantikan kedinamisan. Untuk itu, pemikir progresif

mengajak kepada kebebasan berfikir dengan membuka ruang ijtihad seluas-luasnya dalam seluruh aspek kehidupan dan menghidupkan kembali tradisi liberalisme Islam tersebut<sup>30</sup>.

Liberalisme juga bergerak dalam pembelaan hak-hak sipil dan minoritas. Suatu negara adalah demokratis, diukur dari sejauh mana hak-hak sipil dan minoritas itu dihormati di dalamnya. Negara demokratis dalam pengertian yang sebenarnya menghargai aspirasi tiap individu dan kelompok minoritas. Islam dalam pandangan pemikir progresif, diperuntukkan bukan hanya menaungi umamnya, tapi untuk seluruh kelompok dan golongan. Kejayaan Islam terjadi, bilamana setiap kelompok termasuk minoritas merasa ternaungi dan dihargai aspirasi dan keberadaannya. Prinsip liberalisme juga memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menentukan sendiri bagaimana ia hidup dan melakukan apa yang diinginkan dengan penuh tanggung jawab. Hal demikian dalam pandangan pemikir progresif tidak perlu dikuatirkan secara berlebihan, karena pada akhirnya kebebasan individu juga dibatasi oleh kebebasan orang lain<sup>31</sup>.

Untuk melindungi hak-hak sipil dan minoritas itu, maka sistem liberalisme disertai dengan penegakan hukum (*rule of law*). Karena kebebasan itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya aturan-aturan hukum. Liberalisme hendak mendukung pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat sebagai ganti pemerintahan teokratis yang berdasarkan atas keyakinan agama, atau pemerintahan otoriter yang mengekang hak-hak sipil warganegara. Dalam sistem liberal, kelompok kepercayaan, agama, atau aliran keagamaan minoritas dilindungi selama tidak melakukan pemaksaan dan mengganggu ketertiban umum. Begitupun negara berkewajiban melindungi kelompok minoritas yang tergolong sub budaya (*subculture*) seperti kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender).

Dalam persoalan gender, pemikir muslim progresif mengusulkan ide kesetaraan dan menghapus pandangan keagamaan yang bias gender. Dalam pandangan muslim progresif, penafsiran patriarkhis dalam Islam adalah produk sejarah dan bukan berasal dari Islam itu sendiri. Sejatinya ajaran Islam, begitu pemikir muslim progresif menjelaskan, memihak kepada perempuan. Karena itu, doktrin-doktrin keagamaan klasik yang mendeskreditkan posisi perempuan mesti ditafsir ulang. Penafsiran ulang atas posisi perempuan harus mencakup semua aspek kehidupan, dari mulai

partisipasi perempuan di ruang publik, wilayah pernikahan, waris, kehidupan sosial, hingga wilayah ritual atau ibadah<sup>32</sup>.

Bagi para pemikir muslim progresif, kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dan membentuk opini di ruang publik adalah sama luasnya dengan laki-laki. Islam dalam pandangan mereka, mengizinkan kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, dan bahkan menjadi kepala negara sekalipun. Walaupun pandangan umat muslim belakangan terhadap perempuan boleh dibilang sedikit mulai bergerak maju<sup>33</sup>, dalam pandangan pemikir muslim progresif, saat ini perjuangan untuk membebaskan perempuan dari dominasi laki-laki belum selesai. Demikian itu, karena pembatasan gerak perempuan di ruang publik sejauh ini masih berlangsung. Fenomena tersebut masih terlihat di dunia muslim—seperti Afghanistan, Pakistan, Sudan atau Arab Saudi—terutama dalam pembatasan fungsi Masjid yang tadinya merupakan ruang publik menjadi milik laki-laki<sup>34</sup>.

Pembaruan penafsiran terhadap perempuan juga dilakukan dalam bidang pernikahan. Untuk saat ini, mungkin pandangan tentang anjuran dasar perkawinan adalah monogami sudah bisa diterima oleh banyak kalangan umat muslim. Namun demikian, para muslim progresif melangkah lebih jauh ketika berbicara persoalan perwalian dan pernikahan dua orang dengan keyakinan yang berbeda. Pemikir muslim progresif menilai sistem perwalian bagi perempuan adalah penafsiran yang bias gender, sebagaimana larangan nikah beda agama sebagai penafsiran yang eksklusif. Menurut para pemikir muslim progresif, wanita memiliki hak sepenuhnya atas dirinya, dan karena itu pernikahan tidaklah membutuhkan wali. Begitupun dalam soal pernikahan, tidaklah disyaratkan harus seiman. Demikian itu adalah pilihan yang terkait dengan konteks masing-masing personal. Pernikahan lelaki muslim dengan wanita muslim, atau wanita muslimah dengan lelaki non muslim adalah sah-sah saja menurut agama<sup>35</sup>.

Dalam persoalan waris, penafsiran literal yang mereduksi jatah perempuan juga ditafsir ulang. Menurut para pemikir progresif, umat muslim secara teologis masih terikat oleh penafsiran klasik yang mengatakan perempuan mendapat separuh jatah laki-laki walaupun secara praktik doktrin ini mulai ditinggalkan masyarakat<sup>36</sup>. Dalam bidang sosial, para pemikir muslim progresif menolak doktrin jilbabisasi perempuan. Dalam pandangan pemikir muslim progresif, jilbab adalah budaya arab, dan bukan syari'at Islam itu sendiri. Karena itu, berjilbab bagi muslimah adalah soal pilihan, dan bukan imperial<sup>37</sup>. Dalam bidang ibadah, para pemikir progresif menolak

pandangan klasik tentang keharaman wanita menjadi imam laki-laki. Menurut mereka, wanita itu sah menjadi imam shalat, bukan hanya untuk sesama wanita dan anak-anak, tetapi pula bagi kaum laki-laki<sup>38</sup>.

### **Bentuk Gerakan dan Sosialisasi Ide Jaringan Islam Liberal.**

Bagi banyak orang, ide-ide atau gagasan pemikiran muslim progresif atau mereka yang tergabung dalam jaringan Islam Liberal (JIL) memang tidak mudah untuk dicerna. Karena itu, dalam satu dasawarsa belakangan ini, JIL pernah beberapa kali mengganti strategi sosialisasi ide-idenya. Pada awal-awal periode pergerakan JIL, setidaknya ada tujuh program yang dijalankan untuk mensosialisasikan gagasan JIL.

*Pertama*, sindikasi penulis Islam liberal. Maksudnya adalah mengumpulkan tulisan sejumlah penulis yang selama ini dikenal (atau belum dikenal) oleh publik luas sebagai pembela pluralisme dan inklusivisme. Sindikasi ini akan menyediakan bahan-bahan tulisan, wawancara dan artikel yang baik untuk koran-koran di daerah yang biasanya mengalami kesulitan untuk mendapatkan penulis yang baik. Dengan adanya “otonomi daerah”, maka peran media lokal makin penting, dan suara-suara keagamaan yang toleran juga penting untuk disebarkan melalui media daerah ini. Setiap minggu, akan disediakan artikel dan wawancara untuk koran-koran daerah<sup>39</sup>.

*Kedua*, mengadakan *talkshow* tentang pelbagai isu sosial-keagamaan di tanah air. Perbincangan ini diudarkan melalui radio-radio chanel Islam liberal di seluruh penjuru nusantara semisal Radio Namlapanha di Jakarta, Radio Smart di Manado, Radio DMS di Maluku, Radio Unisi di Jogja, Radio PTPN di Solo, Radio Mara di Bandung, sampai Radio Prima FM di Aceh<sup>40</sup>.

*Ketiga*, Penerbitan Buku. JIL berupaya menghadirkan buku-buku yang bertemakan pluralisme dan inklusivisme agama, baik berupa terjemahan, kumpulan tulisan, maupun penerbitan ulang buku-buku lama yang masih relevan dengan tema-tema tersebut. Saat ini JIL sudah menerbitkan buku kumpulan artikel, wawancara, dan diskusi yang diselenggarakan oleh JIL, berjudul Wajah Liberal Islam di Indonesia<sup>41</sup>.

*Keempat*, penerbitan buku-buku saku. Untuk kebutuhan pembaca umum, JIL menerbitkan Buku saku setebal 50-100 halaman dengan bahasa renyah dan mudah dicerna. Buku Saku ini akan mengulas dan menanggapi sejumlah isu yang menjadi bahan perdebatan dalam masyarakat. Tentu, tanggapan ini dari perspektif Islam Liberal. Tema-tema itu antara lain: jihad, penerapan syari'at

Islam, jilbab, penerapan ajaran “memerintahkan yang baik, dan mencegah yang jahat” (amr ma’ruf, nahy munkar), dan lain-lain.<sup>42</sup>

*Kelima*, melalui mailinglist Islam liberal dengan alamat: islamliberal@yahoo.com. *Keenam*, iklan layanan masyarakat yang berisi tema-tema seperti pluralisme, penghargaan atas perbedaan, dan pencegahan konflik sosial<sup>43</sup>. Sebuah Iklan berjudul "Islam warna-warni" yang pernah ditayangkan di dua stasiun televisi swasta di Indonesia<sup>44</sup>. *Ketujuh*, diskusi-diskusi keislaman yang diselenggarakan atas kerjasama antar organisasi liberal dan diskusi keliling yang dipelopori oleh para mahasiswa di tanah air.<sup>45</sup> Termasuk dalam diskusi ini adalah workshop dan diskusi terbatas di bulan ramadhan yang diadakan setahun sekali sejak tahun 2001<sup>46</sup>.

Kemudian sejak tahun 2006, JIL meluncurkan penerbitan buletin yang memuat diskusi tentang isu-isu pluralisme dan kenegaraan modern bernama "Hiwar". Dalam perkembangan berikutnya, menurut keterangan Taufik Damas—salah seorang koordinator JIL—penerbitan buletin ini juga mengalami hambatan karena persoalan terbatasnya tim penulis. Walaupun demikian, tidak semua program JIL mengalami kemunduran, milis JIL misalnya, mendapatkan respon positif dari banyak pihak yang menghendaki agar diperluas menjadi website yang dapat diakses oleh banyak kalangan. Saat ini, semua produk JIL berupa sindikasi media, talkshow radio, artikel, dan perkembangan berita yang terkait dengan misi JIL di muat melalui website www.Islamlib.com. Sementara itu, milis tetap dipertahankan untuk kalangan terbatas saja<sup>47</sup>.

Dilihat dari grafik perkembangannya, memang tidak ada penambahan program atau bentuk sosialisasi ide-ide JIL yang signifikan. Hal demikian ini dibenarkan oleh Taufik Damas, yang menilai bahwa walaupun JIL mengajak untuk berfikir progresif, namun JIL menolak cara-cara revolutif untuk menyebarkan ide dan gagasan pemikirannya.<sup>48</sup>

Menurut Damas, sejauh ini JIL belum pernah melakukan evaluasi internal menyangkut sejauh mana program-programnya berhasil atau gagal. Bagi JIL, begitu Damas menjelaskan, program jangan dilihat sebagai sesuatu yang bersifat statistik. Betul bahwa jika ingin berhasil, organisasi apapun mesti memiliki *tanzhim* yang jelas minimal menerapkan prinsip 5W I H, atau SWOT. JIL juga menerapkan itu, tapi amat dibatasi dan sederhana sifatnya. Menurut Damas, biarlah lembaga lain yang melakukan riset atas capaian JIL menyebarkan ide-idenya, selanjutnya JIL akan menerima hasil riset itu sebagai pertimbangan langkah kedepan.

## Masa Depan Jaringan Islam Liberal di Indonesia.

Sebagai gerakan yang “melawan” kelompok fundamentalisme dan radikalisme di Indonesia, perjuangan JIL, tentu tidak mudah. Dalam mensosialisasikan ide dan gagasannya tentang Islam progresif, JIL setidaknya harus berhadapan dengan dua kubu pemikiran Islam Indonesia, yaitu kaum tradisionalis-konservatif dan fundamentalis.

Menurut hemat penulis, meskipun diserang bertubi-tubi oleh banyak kelompok, dan begitu besar harga yang mesti dibayar, JIL patut bersyukur, karena masih eksis dan tetap *survive* hingga usianya yang ke-10 sekarang. Ini terjadi, antara lain, karena JIL lahir dalam kondisi politik yang relatif lebih kondusif, terutama sejak Indonesia memasuki era baru, yaitu reformasi.

Terakhir, selain faktor kaderisasi tentu saja, orientasi gerakan Islam liberal di masa depan juga kelihatannya perlu ditinjau ulang. Menurut analisa pemikir muda progresif, Zuhairi Misrawi, Islam liberal harus mempertimbangkan kembali strategi dakwahnya di masa mendatang. Islam liberal harus mulai merambah problem-problem kekinian, memihak dan menyentuh masyarakat paling bawah, sehingga kehadirannya memberikan makna yang riil bagi masyarakat akar rumput.<sup>49</sup> Kalau membawa kebaikan, pasti bertahan, sesuai kaidah, “*al-baqa’ li al-ashlah la li al-aqwa*” (yang menang yang membawa kebaikan, bukan yang kuat).

### Catatan Akhir:

---

<sup>1</sup> Jhon L. Esposito, *Islam The Straight Path*, (New York: Oxford University Press, 2005), Third Edition, h. 228.

<sup>2</sup> Lihat *Perlawanan Islam Liberal*, Majalah Gatra, Edisi 1 Desember 2001, h. 29.

<sup>3</sup> Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyyah di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 215.

<sup>4</sup> Baca Zachary Abuza, *Militant Islam in Southeast Asia: Crucible of Terror*, (Colorado: Lynne Rienner Publisher Inc, 2003), h. 69.

<sup>5</sup> Lihat Muhammad Ali, “The Rise of Liberal Islam Network (JIL) in Contemporary Indonesia,” *The American Journal of Islamic Social Sciences* 22: 1.

<sup>6</sup> Terkait dengan ini, lihat The Wahid Institute, *The Wahid Institute Annual Report 2008 on Religious and Belief Pluralism in Indonesia*, (Jakarta: The Wahid Institute and TIFA, 2008).

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Luthfi Assaukani, *Islam and The Secular State In Indonesia*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009), First Published, h. 201.

---

<sup>9</sup> Buddy Munawar Rachman, *Reorientasi Pembaharuan Islam: Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2010), h. 33.

<sup>10</sup> Lihat Ulil Abshar Abdalla, *Menjadi Muslim Liberal*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005), h. 5.

<sup>11</sup> Budhy Munawar Rachman, *Reorientasi Pembaharuan Islam*, h. 183.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 188.

<sup>13</sup> Model pertama, negara demokrasi Islam (IDS: Islamic Democratic State), diusulkan oleh M. Nastir di awal-awal berdirinya Republik Indonesia. Argumen Natsir, adalah Islam itu lengkap (Syamil) dan sempurna (kamil). Islam tidak boleh digantikan dengan ideologi apapun, termasuk dalam hal bernegara. Model kedua, negara demokrasi agama (RDS: Religious Democratic State), model ini didasarkan atas fakta bahwa Indonesia adalah negara plural. Model ini, dijalankan dalam era pemerintahan Soeharto. Model ketiga, negara demokrasi liberal (LDS: Liberal Democratic State). Model ini merupakan usulan untuk mendiskusikan persoalan politik di luar ranah keagamaan. Tokoh di Indonesia yang mengusulkan ide negara ini menurut Luthfi adalah mantan Presiden Abdurrahman Wahid (alm), dan pemikir kenamaan Nurkholis Madjid. Baca Luthfi Assaukanie, *Islam and The Secular State*, h. 12-18.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 151.

<sup>15</sup> Budhy Munawar Rachman, *Reorientasi Pembaharuan Islam*, h. 193-195.

<sup>16</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, *Ber-Islam di Era Multikulturalisme*, dalam . Abd. Moqshit Ghazali, ed., *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman yang Dinamis*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005), h. 49.

<sup>17</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam dan Pluralisme: Akhlak Qur'an Menyingkapi Perbedaan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), Cet. Kedua, h. 20.

<sup>18</sup> Budhy Munawar Rachman, *Reorientasi Pembaharuan Islam*, h. 631.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 539-540.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 565.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 567.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 382-386

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 331.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 357. Lihat juga Djohan Effendi, *Harus Ada Kebebasan Tidak Beragama*, dalam Luthfi Assaukanie, ed., *Wajah Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2002), h.136.

<sup>25</sup> Budhy Munawar Rachman, *Reorientasi Pembaharuan Islam*, h. 363.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 359.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 370.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 350.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 396. Lihat Juga Muhammad Iqbal, *Reconstruction of Religious Thought in Islam*, terjemahan Arab oleh 'Abbas Mahmud, (Damaskus: Dār al-Haitham, 2000), Cet. Kedua, h. 147.

<sup>30</sup> Budhy Munawar Rachman, *Reorientasi Pembaharuan Islam*, h. 431.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 383.

<sup>32</sup> Sinta Nuriyah Wahid, *Islam Memihak Perempuan*, dalam Abd Moqshit Ghazali, ed., *op.cit.*, h. 253. Mengenai wacana gender dan pembaruan hukum keluarga Islam dan isu-isu feminisme dalam pandangan muslim progresif-moderat, seputar kasus poligami, talak, nikah dan waris, baca Nashirudin dan Sidik hasan,

---

*Poros-Poros Ilahiyah: Perempuan Dalam Lipatan Pemikiran Muslim Liberal Versus Tradisional*, (Surabaya: Jaring Pena, 2009), Cet. Pertama, h. 46. Baca Juga Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, (Jakarta: Kata Kita, 2010), Cet. Pertama, h. 107-108.

<sup>33</sup> Lihat *Ibid*, h. 132-136.

<sup>34</sup> Nasarudin Umar, *Hijabisasi Perempuan dalam Ruang Publik*, dalam Luthfi Assaukanie ed., *Wajah Islam Liberal di Indonesia*, h. 47.

<sup>35</sup> Nurcholis Madjid, et. al., *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 254. Lihat juga Abd. Moqsiith Ghazali, *Argumentasi Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, (Jakarta: Kata Kita, 2009), Cet. Kedua, h. 326.

<sup>36</sup> Nasirudin dan Sidik Hasan, *Poros-Poros Ilahiyah*, h. 252.

<sup>37</sup> Lihat Nong Darol Mahmada, "Kritik Atas Jilbab," dalam Abd. Moqsiith Ghazali, *Argumentasi Pluralisme Agama*, h. 129. Lihat juga Saiful Amin Solihin, "Menyorot Aurat dan Jilbab," *ibid*, h. 135. Lihat Juga Musdah Mulia, "Tidak Boleh Ada Pemaksaan Jilbab," dalam Luthfi Assaukanie, *Wajah Islam Liberal*, h. 129.

<sup>38</sup> Lihat Husein Muhammad dan Nur Rofi'ah, "Perempuan Boleh Mengimami Laki-Laki," dalam Abd. Moqsiith Ghazali, *Argumentasi Pluralisme Agama*, h. 279. Lihat juga Luthfi Assaukanie, *Islam Benar versus Islam Salah*, (Jakarta: Kata Kita, 2007), Cet. Pertama, h. 31.

<sup>39</sup> *Program Jaringan Islam Liberal*, Di akses dari [www.Islamlib.com](http://www.Islamlib.com) pada tanggal 20 Januari 2010.

<sup>40</sup> *Ibid*.

<sup>41</sup> *Ibid*.

<sup>42</sup> *Ibid*.

<sup>43</sup> *Ibid*.

<sup>44</sup> *Ibid*.

<sup>45</sup> *Ibid*.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Taufik Damas, 2 Februari 2011.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Taufik Damas, 2 Februari 2011.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Taufik Damas, 2 Februari 2011.

<sup>49</sup> *Ibid*, h. xiii.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdalla, Ulil Abshar, "Kita Ingin Islam Liberal Sampai ke Mushalla,"  
Majalah *Syari'ah*, edisi April 2005.

-----, *Menjadi Muslim Liberal*, Jakarta; Jaringan Islam Liberal, 2005.

Abuza, Zachary, *Militant Islam in Southeast Asia: Crucible of Terror*,  
Collorado: Lynne Rienner Publisher Inc, 2003.

Ali, Muhammad, "The Rise of Liberal Islam Network (JIL) in  
Contemporary Indonesia," *The American Journal of Islamic Social  
Sciences* 22: 1.

- 
- Assaukani, Luthfi, *Islam and The Secular State In Indonesia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009.
- , *Islam Benar Versus Islam Salah*, Jakarta: Kata Kita, 2007.
- , *Wajah Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2002.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, "Ber-Islam di Era Multikulturalisme," dalam Abd. Moqshith Ghazali, Ed., *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman yang Dinamis*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005.
- Barton, Greg, *The Emergence of Neo-Modernism: A Progressive, Liberal Movement of Islamic Thought In Indonesia*, terjemahan Indonesia oleh Nanang Tahqiq, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Damanik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyyah di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002.
- Effendi, Djohan, "Harus Ada Kebebasan Tidak Beragama", dalam Luthfi Assaukani, *Wajah Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2002.
- Esposito, John L., *Islam The Straight Path*, New York: Oxford University Press, 2005.
- Ghazali, Abd. Moqsith, *Argumentasi Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, Jakarta: Kata Kita, 2009.
- Harjanto, Nicolaus Teguh Budi, *Islam and Liberalism in Contemporary Indonesia: The Political Ideas of Jaringan Islam Liberal (JIL)*, Thesis Submitted to the Faculty of the College of Arts and Sciences, Ohio University.
- Hasyim Syafiq, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, Jakarta: Kata Kita, 2010.
- Hooker, Virginia M. "Developing Islamic Argument For Change Through Liberal Islam," dalam Amin Saikal dan Virginia M. Hooker, *Islamic Perspective on The New Millenium: Iseas Series on Islam*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004..
- Husaini, Adian "Dari Yahudi Liberal ke Islam Liberal," pengantar dalam Budi Hardianto, *50 Tokoh Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Hujjah Press, 2008.

- 
- Iqbal, Muhammad, *Reconstruction of Religious Thought in Islam*, terjemahan Arab oleh 'Abbas Mahmud, Damaskus: Dar al Haitham, 2000.
- Majalah Gatra, *Perlawanan Islam Liberal*, Edisi 1 Desember 2001
- Madjid, Nurcholish, et. al., *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Mahmada, Nong Darol “Kritik Atas Jilbab”, dalam Abd. Moqsith Ghazali, *Argumentasi Pluralisme Agama*: Jakarta: JIL, 2005.
- Misrawi, Zuhairi, “Dari Islam Liberal ke Islam Progresif,” Pengantar dalam Shalahuddin Jursi, *Membumikan Islam Progresif*, Shalahuddin Jursi, terjemahan Ainul Abid Shah, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Muhammad, Husein dan Nur Rofi'ah, “Perempuan Boleh Mengimami Laki-Laki,” dalam Abd. Moqsith Ghazali, *Argumentasi Pluralisme Agama*: Jakarta: JIL, 2005.
- Nashirudin dan Sidik Hasan, *Poros-Poros Ilahiyah: Perempuan Dalam Lipatan Pemikiran Muslim Liberal Versus Tradisional*, Surabaya: Jaring Pena, 2009.
- Rachman, Budhy Munawar, *Reorientasi Pembaharuan Islam: Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2010.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam dan Pluralisme: Akhlak Qur'an Menyingkapi Perbedaan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- The Wahid Institute, *The Wahid Institute Annual Report 2008 on Religious and Belief Pluralism in Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute and TIFA, 2008.
- Umar, Nasarudin, “Hijabisasi Perempuan Dalam Ruang Publik,” dalam Luthfi Assaukanie, *Wajah Islam Liberal Indonesia*, Jakarta: JIL, 2002.
- Wahid, Sinta Nuriyah, “Islam Memihak Perempuan,” dalam Abd Moqsith Ghazali, ed., *Ijtihad Islam Liberal*, Jakarta, JIL, 2005.